



## Inklusivitas Ekonomi Digital di Kawasan Asia Tenggara pada Kepemimpinan ASEAN 2023

### INFO PENULIS

Alisa Zahrah  
Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta  
[alisazahrah090402@gmail.com](mailto:alisazahrah090402@gmail.com)  
+6285719458719

Shanti Darmastuti  
Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta  
[shanti.darmastuti@upnvj.ac.id](mailto:shanti.darmastuti@upnvj.ac.id)  
+6281311392704

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 3, Desember 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Zahrah, A., & Darmastuti, S. (2024). Inklusivitas Ekonomi Digital di Kawasan Asia Tenggara pada Kepemimpinan ASEAN 2023. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1289-1302.

### **Abstrak**

Dalam menghadapi tantangan global dan inflasi, pertumbuhan ekonomi digital ASEAN telah terpengaruh secara signifikan. Kemampuan untuk mengendalikan inflasi di kawasan ASEAN telah menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap ekspansi ekonomi digital, yang menyoroti kesenjangan di antara negara-negara anggota. Kemampuan ekonomi digital anggota ASEAN masih tertinggal dari kawasan lain, sehingga perlu upaya bersama untuk menjembatani kesenjangan ini. Pada tahun 2023, keketuaan Indonesia di ASEAN memberikan kesempatan penting untuk memelopori inisiatif yang bertujuan untuk memajukan ekonomi digital di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada teori institusi regional dan konsep ekonomi digital. Pendekatan strategis Indonesia berfokus pada penguatan kerangka kerja ekonomi digital dan peningkatan kerangka kerja kebijakan di tingkat kelembagaan di ASEAN. Penelitian ini menemukan strategi ASEAN melanjutkan *ASEAN Digital Masterplan 2025* dan mengimplementasikan *Bandar Seri Begawan Roadmap 2021* sangatlah penting. Rencana-rencana ini menjadi dasar bagi transformasi digital, mendorong pertumbuhan inklusif dan inovasi teknologi di seluruh kawasan. *ASEAN Digital Minister's Meeting (ADGMIN)* memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama dan menetapkan arah kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, memprakarsai pembentukan *Digital Economy Framework Agreement (DEFA)* sangat penting untuk menciptakan ekonomi digital yang kohesif dan terintegrasi di ASEAN.

**Kata Kunci:** Keketuaan Indonesia 2023, Ekonomi Digital, ASEAN, DEFA.

### Abstract

In the face of global challenges and inflation, ASEAN's digital economy growth has been significantly affected. The ability to control inflation in the ASEAN region has shown a marked influence on the expansion of the digital economy, highlighting the gap among member states. ASEAN members' digital economy capabilities are still lagging behind other regions, which calls for concerted efforts to bridge this gap. In 2023, Indonesia's chairmanship of ASEAN provides an important opportunity to spearhead initiatives aimed at advancing the digital economy in Southeast Asia. This study uses a qualitative method based on regional institutional theory and the concept of the digital economy. Indonesia's strategic approach focuses on strengthening the digital economy framework and improving policy frameworks at the institutional level in ASEAN. This research finds that ASEAN's strategy of continuing the ASEAN Digital Masterplan 2025 and implementing the Bandar Seri Begawan Roadmap 2021 is critical. These plans lay the foundation for digital transformation, driving inclusive growth and technological innovation across the region. The ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN) plays an important role in facilitating cooperation and setting policy directions to achieve these goals. In addition, initiating the establishment of a Digital Economy Framework Agreement (DEFA) is critical to creating a cohesive and integrated digital economy in ASEAN.

**Key Words:** Indonesia Chairmanship 2023, Digital Economy, ASEAN, DEFA.

### A. Pendahuluan

Ekonomi menjadi salah satu aspek utama bagi roda kehidupan suatu negara. Dalam buku *The Theory of Moral Sentiments*, Adam Smith berkata bahwa national interest terkait ekonomi menjadi sebuah jaminan bagi kebutuhan dasar (Smith, 2006). Hal ini karena ekonomi memiliki peran sentral yang tak tergantikan dalam menentukan kemakmuran, kesejahteraan, dan perkembangan sosial masyarakat. Pada masa globalisasi terjadi perubahan sifat atau struktur fundamental perekonomian dunia dan perubahan ini dipicu oleh kemajuan teknologi, seperti teknologi informasi yang memungkinkan aliran barang, jasa, dan informasi secara lebih cepat di seluruh dunia (Wibowo, 2018). Lahirnya produk teknologi digital seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), serta robotika telah mengakibatkan transformasi yang besar pada masyarakat, dan kedepannya akan terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, masuk ke dalam rencana-rencana yang dibuat, hingga mampu mengetahui tindakan yang akan dilakukan (Frank et al., 2017).

Maka dari itu, dalam revolusi digital, negara-negara yang ingin tetap bersaing dalam panggung ekonomi global harus mengintegrasikan digitalisasi ke dalam sektor ekonomi mereka. Integrasi digitalisasi dalam sektor ekonomi bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan keharusan dalam era digital dan teknologi tinggi. Negara-negara yang berhasil mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital akan mendapatkan keuntungan kompetitif yang signifikan dalam membangun ekonomi yang cerdas dan berkelanjutan. Digitalisasi bukan hanya tentang mengikuti tren, tetapi juga tentang menciptakan peluang baru yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, *global headwinds* memberikan dampak paling buruk sepanjang masa di berbagai wilayah. Amerika Utara terpukul keras oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penutupan bisnis dan pembatasan perjalanan, sementara ketidakpastian politik juga memperburuk situasi. Fenomena ini berpengaruh pada lonjakan inflasi di berbagai belahan dunia. Saat ekonomi terguncang oleh krisis seperti pandemi COVID-19, serta dampak *lockdown* dan ketidakpastian politik, berbagai elemen bisa memicu lonjakan harga. Asia Tenggara menjadi kawasan yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dalam menghadapi *global headwinds* dibandingkan regional lain di seluruh dunia.

Pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) kawasan ini sebesar 4% masih lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi sebesar 3% dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2025 sebesar 4.7%, berbeda dengan regional lain yang diperkirakan fluktuatif, sehingga

pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ini dapat mencapai 27% (Google, Temasek, & Bain & Company, 2023). Kestabilan ekonomi yang dihasilkan oleh pengendalian inflasi menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi digital, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara menjadi regional penting karena memiliki potensi untuk bersaing dengan hegemoni dunia, seperti Amerika dan China (Berita Satu, 2023). Amerika Serikat sering kali menjadi penggerak utama dalam menentukan tren dan inovasi dalam ekonomi digital, membawa dampak besar bagi negara-negara ASEAN. Di sisi lain, China mengusung kolaborasi melalui masterplan *Belt and Road Initiative* (BRI), menawarkan kesempatan untuk kerja sama dalam infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ASEAN berada dalam posisi yang unik untuk mengeksplorasi peluang dari kedua kekuatan ini, sambil menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi mereka sendiri.

Isu inklusivitas ekonomi digital menjadi krusial dan harus menjadi fokus utama bagi para pemimpin ASEAN. Bertepatan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, diperlukan strategi yang kuat dan berkesinambungan dalam memajukan ekonomi digital di seluruh negara anggota ASEAN. Diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam siaran persnya, di mana ia menekankan perlunya setiap inovasi dilakukan dengan cermat, memperhatikan dan mengantisipasi risiko, memiliki sistem keamanan yang andal, serta perlindungan konsumen yang efektif, tapi pengurangan risiko ini memerlukan perhitungan yang matang terkait regulasi, pengawasan, monitoring, dampak terhadap nilai tukar, dan berkelanjutan dalam penerapan internasionalnya (Kemenko Perekonomian, 2023).

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memajukan ekonomi digital kawasan melalui konsep kepemimpinan "*ASEAN Matters Epicentrum of Growth*". Salah satu fokus utama keketuaan ASEAN tahun 2023 adalah mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif (ASEAN, 2023c). Ini tercermin melalui komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ekonomi digital di seluruh kawasan. Langkah-langkah tersebut mencakup pembangunan infrastruktur digital yang merata, peningkatan aksesibilitas internet, pembentukan regulasi yang mendukung, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat secara aktif dalam ekonomi digital. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, ASEAN berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, di mana manfaatnya meningkatkan kemampuan negara anggota di kawasan ini.

Ekonomi digital merevolusi model bisnis, mendorong inovasi dan mentransformasi perekonomian ASEAN. Kemajuan teknologi dan analisis data menciptakan model bisnis baru dan mengaburkan batasan antara dunia fisik dan digital. Namun tantangan masih tetap ada, terlepas dari hambatan-hambatan ini, ekonomi digital menawarkan peluang besar bagi dunia usaha ASEAN untuk melakukan modernisasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi kawasan (Avirutha, 2021). kekurangan keterampilan dan kemampuan digital dalam angkatan kerja di wilayah ini menjadi tantangan, yang menyoroti urgensi kebijakan yang berfokus pada meningkatkan keterampilan digital, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Park, 2024).

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia harus bisa mengimbangi kualitas ekonomi digital di antara anggota negara rendah dan negara maju di kawasan Asia Tenggara. Studi perbandingan negara-negara ASEAN terkait perkembangan ekonomi digital ASEAN dengan fokus pada teknologi, tata kelola, dan dampak mengungkapkan kekuatan dan kelemahan pada pilar-pilar seperti akses terhadap teknologi, keterampilan *Information and Communication Technologies* (ICT), dan dampak ekonomi. *Network Readiness Index* (NRI) digunakan untuk menganalisis dan membandingkan indikator untuk menunjukkan potensi kesiapan ekonomi digital di suatu wilayah. Singapura, Malaysia, dan Thailand tergolong sebagai negara-negara yang memiliki ekonomi digital terbesar, setiap satu memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Studi ini menyoroti pentingnya keterampilan digital dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital masa depan di kawasan Asia Tenggara (Tran et al., 2022).

Penulis memilih kawasan Asia Tenggara bukan sekedar momentum keketuaan Indonesia di tahun ini, tetapi menjadi kawasan yang strategis. ASEAN dianggap sebagai lingkaran konsentris Indonesia karena berperan penting dalam kerja sama regional dan pengambilan kebijakan

Indonesia. Konsep lingkaran konsentris memandu Indonesia dalam menentukan prioritas bidang intervensi dalam hubungan internasional. Artinya menekankan stabilitas dan keamanan kawasan yang menjadi prioritas utama Indonesia. Selain itu, ASEAN merupakan salah satu bentuk pertahanan berlapis ketahanan nasional Indonesia, termasuk perannya sebagai *buffer zone* antara Indonesia, Tiongkok, dan negara-negara Barat. ASEAN mempunyai arti penting dalam lingkaran konsentris kerja sama regional di Indonesia. Terkait ekonomi digital, maka Konsep Lingkaran Konsentris memandu pendekatan Indonesia dalam pengambilan kebijakan regional, menekankan kepentingan strategis negara di kawasan ini (Andis Rafaldhanis, 2023).

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini akan membahas secara rinci mengenai strategi Indonesia yang dijalankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN untuk mencapai pada inklusivitas, melalui penguatan kerangka kebijakan. Dengan menggali potensi kolaborasi antar negara untuk membentuk kemampuan yang sama. Serta mengeksplorasi peran penting Indonesia dalam mengarahkan arus kemajuan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia untuk mencapai inklusivitas ekonomi digital berdasarkan perannya dalam kepemimpinan ASEAN 2023, serta tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pelaku bisnis di kawasan ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya studi literatur terkait digitalisasi ekonomi ASEAN, memperluas pemahaman tentang implikasi digitalisasi ekonomi Indonesia dalam konteks kepemimpinan ASEAN 2023, dan mempersiapkan masa depan digital yang semakin terkoneksi di ASEAN.

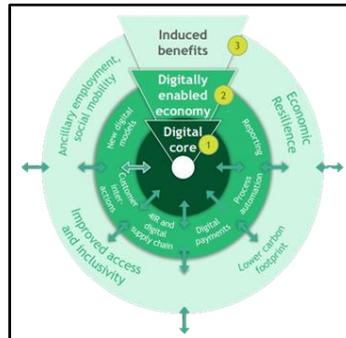
Berbicara mengenai kawasan Asia Tenggara, Aritenang mengatakan bahwa institusi regional dapat mempromosikan kerja sama dan integrasi politik dan ekonomi di antara negara-negara anggotanya, seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Aritenang, 2017). Selaras dengan Lenz yang menyebut bahwa ASEAN akan membentuk pasar bersama (Lenz, 2017). Pandangan liberalism institusi, ketika diterapkan pada konteks regionalisme, menyoroti pentingnya institusi regional seperti ASEAN dalam mendorong kerjasama antarnegara. Fokusnya adalah pada peran lembaga-lembaga ini dalam memfasilitasi kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas keamanan, serta koordinasi politik di wilayah spesifik. Oleh karena itu, ASEAN memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pengaturan kebijakan regional, perjanjian perdagangan, dan inisiasi kolaborasi antar anggotanya untuk mencapai kestabilan ekonomi kawasan.

Aritenang yang menyetujui bahwa Institusi regional memiliki peran penting dalam menghasilkan dukungan bagi penelitian, pengembangan teknologi, dan kewirausahaan. Melalui kebijakan serta kerjasama yang dilakukan antara anggota-anggotanya, hal ini menghasilkan siklus dimana investasi dan adopsi teknologi baru berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN (Aritenang, 2017). Maka pembentukan kebijakan ekonomi digital oleh ASEAN harus mengadopsi norma lintas negara yang sesuai dengan keyakinan dan praktik normatif negara-negara anggota agar kebijakan nantinya dapat diimplementasikan selaras di negara anggota dan menghasilkan kemajuan yang diharapkan oleh kawasan.

Penelitian akan mengimplementasikan teori institusi regional dengan meneliti peran yang dimainkan oleh ASEAN sebagai entitas pembuat kebijakan. Fokus utamanya akan tertuju pada bagaimana ASEAN bertindak sebagai lembaga regional yang memfasilitasi strategi-strategi optimal untuk wilayah Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan persaingan ekonomi global. Ini mencakup evaluasi terhadap peran ASEAN dalam membentuk kerangka kerja kebijakan yang memungkinkan negara-negara anggotanya untuk berkoordinasi secara lebih efektif dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonomi digital muncul dari miliaran koneksi online yang terjadi setiap hari antara orang, bisnis, perangkat, data, dan proses, yang didukung oleh hiper konektivitas dari Internet, teknologi seluler, dan *Internet of Things* (IoT) (Deloitte, 2021). Øverby & Audestad memiliki pandangan yang sama, ekonomi digital merupakan ragam teknologi informasi dan komunikasi seperti Internet, ponsel pintar, jaringan seluler dan nirkabel, teknologi optik, *Internet of Things* (IoT), penyimpanan dan komputasi awan, layanan berbagi, aplikasi, dan mata uang digital, di mana pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh adopsi teknologi oleh masyarakat (Øverby & Audestad, 2021). Selain itu, data memiliki kekuatan besar yang bisa membantu perusahaan memahami industri dan pelanggan mereka dengan lebih baik. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan teknologi, perusahaan akan memiliki lebih banyak informasi tentang

konsumen, yang akan mempengaruhi cara mereka berkembang (University of Pennsylvania, 2023). Maka penulis menyimpulkan bahwa ekonomi digital dapat dipandang sebagai evolusi dari ekonomi konvensional, di mana integrasi teknologi digital telah merambah ke semua sektor ekonomi. Dalam konteks ini, kegiatan jual beli barang dan jasa kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga hadir secara online melalui berbagai platform digital. Platform-platform ini, yang muncul dalam bentuk aplikasi, didasarkan pada teknologi *Internet of Things* (IoT), data analitik, dan komputasi awan. Perubahan ini memungkinkan transaksi menjadi lebih efisien, terjangkau, dan terhubung secara global, mengubah cara tradisional dalam menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan konsumen.



Gambar 1. Ekosistem Ekonomi Digital ASEAN

Sumber : *Digital Economy Framework Agreement (DEFA) 2023*

Penulis mengadopsi konsep ekonomi digital yang telah dikembangkan oleh ASEAN pada tahun 2023. Konsep ini menggambarkan ekosistem ekonomi digital yang dirancang untuk diterapkan dalam jangka panjang di kawasan Asia Tenggara, dan terdiri dari tiga siklus utama. Siklus pertama memfokuskan pada aspek teknologi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras, data, *Internet of Things* (IoT), hingga *deep tech*. Siklus kedua berfokus pada aspek bisnis yang muncul dari penerapan teknologi tersebut, seperti *e-commerce*, *fintech*, *agritech*, dan lain-lain. Siklus ketiga menilai manfaat yang diperoleh dari integrasi teknologi dan bisnis digital, termasuk mobilitas sosial, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan ketahanan ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, penulis menganggap bahwa meneliti tentang ekonomi digital merupakan pilihan yang sangat tepat untuk mempelajari strategi yang diterapkan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN. Hal ini menjadi krusial bagi Indonesia untuk menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi persaingan global yang telah beralih ke arah digital. Pembangunan ekosistem digital di ASEAN menjadi fokus yang penting dalam upaya menciptakan ASEAN Digital Community 2045. Sementara itu, tujuan yang telah diinisiasi sebelumnya oleh ASEAN harus diteruskan dengan merumuskan strategi yang sesuai dengan prinsip yang telah disepakati, serta kebijakan yang diterapkan perlu memperhatikan konsep lokalitas yang memperhatikan keberagaman masyarakat ASEAN.

## B. Metodologi

Penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif di mana peneliti akan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dalam konteks hubungan internasional. Definisi penelitian kualitatif menurut Anton Sevilla-Liu adalah jenis penelitian yang menggunakan data bahasa alami untuk memperoleh pemahaman tentang kekhususan, variasi pengalaman individu, dan maknanya (Sevilla-Liu, 2023). Berbeda dengan Yadav yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berasal dari paradigma yang berbeda dan secara alamiah mengharapkan standar evaluasi serta variasi kontribusi penelitian yang tidak umum dan spesifik (Yadav, 2022). Melalui metode ini penulis akan mengeksplorasi pandangan, sikap, dan praktik budaya yang mempengaruhi pengembangan kebijakan ekonomi digital di ASEAN. Dengan penelitian kualitatif, dapat lebih mendalam memahami bagaimana Indonesia sebagai pemimpin dapat memperkuat kerja sama di kawasan, menganalisis pandangan beragam dari

pemangku kepentingan, dan memahami kompleksitas faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang berpengaruh pada rencana strategi dalam mencapai tujuan ekonomi digital ASEAN.

Sebagai penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah studi pustaka dan wawancara, yang akan memberikan dasar untuk memahami informasi terkini dan perspektif terkait strategi Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam memajukan ekonomi digital. Informasi ini akan disusun dan dievaluasi untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan dalam kerangka penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan terkait, untuk mengumpulkan data primer yang akan memberikan kontribusi dalam memvalidasi informasi dan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam, yaitu :

- 1) Perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- 2) Perwakilan Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber langsung. Sementara itu, data sekunder dari berbagai sumber seperti internet, buku, jurnal, dan dokumen negara digunakan sebagai dukungan untuk data primer, menjaga relevansi dengan topik penelitian tentang ASEAN dan ekonomi digital.

Dalam penelitian *contextual behavioral science*, metode analisis alur naratif, motif atau aturan, tokoh, dan kompleksitas digunakan sebagai bentuk kontekstualisme deskriptif yang dapat membantu kita lebih memahami klien dan partisipan serta cara mereka memandang diri mereka sendiri dan perjuangan mereka (Sevilla-Liu, 2023). Sejalan dengan pendapat Dursun, data hasil wawancara harus diproses melalui kategorisasi dan penamaan masing-masing, setelah menerjemahkan wawancara tersebut ke dalam bentuk tulisan, maka analisis dilakukan dengan cara deskriptif (Dursun, 2023). Menyajikan deskripsi menggunakan pendekatan eksploratif sesuai pemaknaan kualitatif, dapat dijalankan dengan tiga langkah, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Lune & Berg, 2017).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1) Hasil

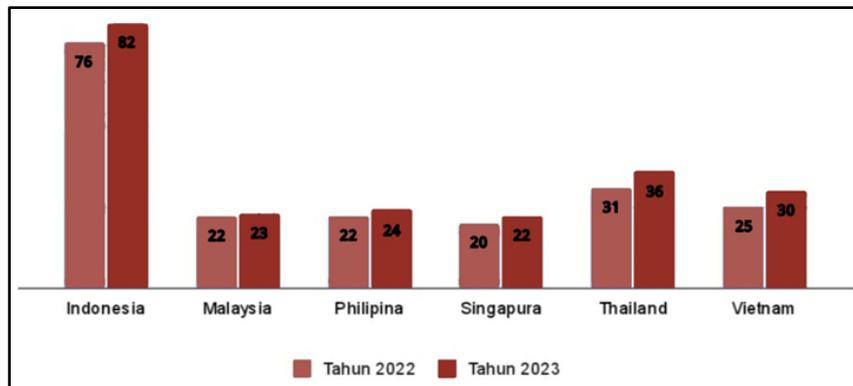
Berdasarkan studi komparasi yang dilakukan oleh LAM Quynh Trang Tran, Dai Thich Phan, dan Manh Tuan Nguyen, menyatakan bahwa kekuatan ekonomi digital negara-negara ASEAN dikelompokkan menjadi tiga kelas, di antaranya (Tran et al., 2022) :

- Kelas pertama, diwakili oleh Singapura, unggul dalam ekonomi digital di tingkat global, terutama dalam pilar dampak, dengan indikator kuat dalam pembangunan berkelanjutan dan teknologi.
- Kelas kedua, terdiri dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina, menunjukkan kekuatan yang beragam di berbagai pilar seperti teknologi dan dampak.
- Kelas ketiga, termasuk Laos dan Kamboja, tertinggal dalam kesiapan ekonomi digital dibandingkan dengan kelas pertama dan kedua, dengan skor dan dampak *Networked Readiness Index* (NRI) keseluruhan yang lebih rendah di kawasan ASEAN.

Sementara itu, dua negara lainnya, Myanmar dan Brunei Darussalam, tidak masuk ke dalam kelompok tersebut karena berdasarkan penelitian yang didasarkan pada statistik *Networked Readiness Index* (NRI) dari laporan *World Bank dan International Monetary Fund* (IMF), kedua negara ini tidak termasuk dalam statistik yang digunakan. Kesenjangan dalam ekonomi digital di antara negara-negara ASEAN disebabkan oleh kurangnya kerjasama menuju inklusi ekonomi digital, yang menghambat upaya mengatasi berbagai tantangan yang belum terselesaikan. Negara-negara ASEAN menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dan akses internet hingga rendahnya literasi digital dan keterampilan teknologi. Perbedaan dalam tingkat perkembangan ekonomi digital antara negara maju seperti Singapura dan Malaysia dibandingkan dengan negara seperti Laos dan Kamboja mencerminkan kebutuhan mendesak akan upaya kolaboratif yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya laporan yang diterbitkan google terkait ekonomi digital di Asia Tenggara, ke-4 negara dengan GDP terendah tidak masuk ke dalam

laporan tersebut. Sejalan dengan laporan GDP negara-negara ASEAN pada 2022, Indonesia berada pada urutan pertama di susul Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, serta empat negara terendah, Myanmar, Kamboja, Lao PDR, dan Brunei Darussalam (ASEAN, 2023d). Berdasarkan grafik di bawah ini, terlihat bahwa Indonesia menempati kedudukan yang unggul dari negara-negara ASEAN lainnya, bahkan dari Singapura yang memiliki teknologi lebih maju dibandingkan Indonesia. Namun tingkat pertumbuhan yang signifikan itu berkaitan dengan jumlah populasi Indonesia yang besar, bukan karena kualitas populasinya.



Gambar 2. GMV Ekonomi Digital Negara-Negara ASEAN  
Sumber : Google, Temasek, & Bain & Company, 2023

Tantangan ekonomi digital tidak hanya menuju pada ASEAN yang belum memiliki kemampuan yang setara dengan regional lain. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2023 memiliki lebih banyak tantangan khususnya dalam ranah ekonomi digital. Indonesia memiliki posisi yang sangat krusial karena ASEAN merupakan kawasan dengan anggota yang terdiri dari ekonomi maju dan rendah. Untuk mencapai inklusi ekonomi digital yang lebih besar, ASEAN perlu meningkatkan kolaborasi regional, berbagi pengetahuan, dan sumber daya, serta mengharmonisasikan regulasi dan investasi dalam infrastruktur digital. Dengan strategi terpadu, ASEAN dapat menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua negara anggota dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan.

Memasuki kepemimpinan Indonesia di 2023, ASEAN fokus pada “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” Konsep ini bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan memanfaatkan transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan (ASEAN Indonesia, 2023). Menurut pendapat dari Perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN bahwa kepemimpinan Indonesia menekankan integrasi digital, keberlanjutan, dan ketahanan dalam kebijakan regional, mendorong pertumbuhan inklusif dan stabilitas di seluruh negara anggota. Keketuaan Indonesia memiliki prioritas yaitu, transformasi ASEAN. Indonesia memandang bahwa sebuah kawasan harus memiliki resilience dan kesiapan untuk menghadapi tantangan kedepan. Berikut strategi yang dilakukan Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 melalui penguatan kebijakan dengan berlandaskan *guidelines* yang telah ada pada pilar ekonomi ASEAN dalam memajukan ekonomi digital ASEAN, di antaranya :

#### a) **Melanjutkan ASEAN Digital Masterplan 2025**

Respon ASEAN terhadap urgensi transformasi digital diwujudkan melalui pembentukan grand design pada *ASEAN Digital Masterplan* sebagai strategi menyeluruh yang dirancang untuk menjadikan ASEAN sebagai komunitas digital dan blok ekonomi terkemuka pada tahun 2021. Meskipun tidak mengikat secara hukum, ADM memiliki bobot dan pengaruh yang besar karena didukung oleh para pemimpin ASEAN.

Rencana ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan mendorong inovasi di seluruh kawasan (ASEAN, 2021a). ADM 2025 dihasilkan melalui pertemuan pertama *ASEAN Digital Ministers Meeting* (ADGMIN) yang diselenggarakan secara online ketika pandemi

berlangsung (ASEAN, 2021c). Dengan dukungan penuh dari para pemimpin, ADM dirancang untuk membentuk ekosistem digital yang inklusif dan kompetitif, memastikan bahwa ASEAN siap menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Hal ini diperkuat dengan pendapat Perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN bahwa ADM menjadi panduan yang akan terus digunakan sebagai peta jalan atau roadmap untuk mencapai tujuan ekonomi digital di ASEAN. Bentuk strategi ini seperti *wishlist* yang telah disepakati, di mana setiap tahun terdapat target yang harus dicapai. Ini membantu memastikan bahwa setiap langkah menuju visi ASEAN sebagai komunitas digital terkemuka dapat dipantau dan diukur dengan jelas.

**b) Melanjutkan *Bandar Seri Begawan Roadmap 2021***

BSBR awalnya bukan dibuat sebagai roadmap, tetapi sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi COVID-19, sekaligus meningkatkan daya saing jangka panjang. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital di kawasan ASEAN, memastikan bahwa wilayah tersebut dapat mengatasi tantangan masa depan dan tetap kompetitif di era digital (ASEAN, 2021b). Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa transformasi digital, BSBR ada sebagai *policy tools* begitupun dengan ADM 2025 (Phnom Phen, 2024). Kemudian mengapa BSBR ini dibuat sedangkan ASEAN telah memiliki *grand design* pada ADM 2025, berikut perbedaanya :

Tabel 1. Perbedaan ADM dan BSBR

	<b>ASEAN Digital Masterplan 2025</b>	<b>Bandar Seri Begawan Roadmap 2021</b>
<b>Cakupan</b>	Jangka Panjang	Jangka Pendek
<b>Fokus</b>	Fokus Sasaran strategis transformasi digital ASEAN	Rencana aksi untuk mempercepat transformasi digital dan pemulihan ekonomi
<b>Hubungan</b>	ADM 2025 menjadi dasar pembentukan BSBR 2021	ADM 2025 menyediakan kerangka kerja BSBR 2021

Sumber : Diolah Penulis

Inisiatif BSBR didasarkan pada tindakan-tindakan yang sudah ada di ASEAN tanpa menciptakan inisiatif yang tumpang tindih (ASEAN, 2021b). Memastikan koordinasi yang efisien dan menghindari duplikasi usaha. Selain itu, BSBR menjadi landasan hukum yang menjembatani antara grand design dengan perwujudan nyata, khususnya dalam agenda ekonomi digital. Dengan demikian, BSBR memfasilitasi penerapan strategi digital yang telah dirancang, memastikan bahwa visi besar ASEAN dalam ekonomi digital dapat direalisasikan secara efektif dan terstruktur.

**c) Melaksanakan *ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN)***

ADGMIN adalah representasi menteri-menteri di bidang teknologi digital dan merupakan hasil evolusi dari TELMIN, yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor *information and communications technology* (ICT) tanpa menyentuh aspek digital (ASEAN, n.d.). Transformasi ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital, dengan ADGMIN memainkan peran penting dalam memperkuat kerangka kerja digital di ASEAN dan meningkatkan daya saing regional melalui inovasi teknologi.

Membahas dan mengatasi isu-isu penting, menjadi tugas utama ADGMIN, baik mengenai pengembangan digital, inisiatif yang telah dibuat, atau kerja sama di ASEAN. Hasil dari diskusi ini kemudian disusun dalam bentuk pernyataan dan deklarasi kebijakan yang menguraikan tujuan serta komitmen bersama mengenai isu-isu digital (Crowell, 2024). Dengan demikian, ADGMIN berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendorong kemajuan teknologi

digital di kawasan, memastikan bahwa ASEAN dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan digital dan tetap kompetitif di era global.

**d) Menginisiasi *Digital Economy Framework Agreement (DEFA)***

Pada masa keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mengusung *Digital Economy Framework Agreement (DEFA)* sebagai salah satu andalan utama untuk mendorong kemajuan ekonomi digital di kawasan (Humas, 2023). DEFA menjadi landasan strategis dalam upaya Indonesia untuk memperkuat integrasi ekonomi digital ASEAN, menghadirkan kerangka kerja yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan serta memaksimalkan peluang dalam era digital. Pada 3 September 2023, pertemuan ke-23 *ASEAN Economic Community Council (AECC)* meresmikan pembentukan DEFA (Kemendag, 2023). Dengan mengusung DEFA, Indonesia menunjukkan visi yang jelas dan komitmen kuat untuk memimpin ASEAN menuju masa depan digital yang lebih terhubung, inklusif, dan inovatif.

Kesepakatan DEFA sebagai penguat integrasi dan transformasi digital di kawasan, sejalan komitmen yang telah disepakati dalam Peta Jalan *Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR)* (ASEAN, 2023b). Dengan memulai negosiasi DEFA, ASEAN berupaya menciptakan kerangka kerja yang terkoordinasi dan komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di seluruh kawasan. Kesepakatan ini mencerminkan tekad ASEAN untuk mengatasi tantangan bersama dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital, termasuk peningkatan konektivitas, memperkuat infrastruktur digital, serta memperluas akses ke layanan digital.

Menurut Dr. Kao Kim Hourn, Sekretaris Jenderal ASEAN, DEFA adalah tonggak bersejarah dan salah satu pencapaian paling signifikan pada tahun 2023, yang menjadi langkah persiapan penting bagi ASEAN untuk memulai perundingan DEFA (ASEAN, 2023a). DEFA juga merupakan bukti nyata dari komitmen jangka panjang ASEAN untuk menyambut transformasi digital yang akan mengangkat bisnis ASEAN ke panggung global dan membuka era baru pertumbuhan ekonomi tanpa batas. DEFA menjadi dasar utama sebagai perjanjian yang mengatur seluruh aspek ekonomi digital secara spesifik, sehingga DEFA menjadi sangat penting.

Proyeksi target DEFA, menurut model bottom-up yang dikembangkan oleh *Boston Consulting Group*, ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat tiga kali lipat pada akhir dekade ini melalui adopsi teknologi digital, tumbuh dari sekitar 300 miliar USD menjadi hampir 1 triliun USD pada tahun 2030. Aturan progresif dalam *Digital Economy Framework Agreement (ASEAN, 2023a)* diharapkan akan melipatgandakan kontribusi nilai ini, membuka peluang sebesar 2 triliun USD bagi ekonomi digital ASEAN (ASEAN, 2023b). Hal ini menunjukkan potensi luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi regional yang didorong oleh inovasi teknologi dan kerangka kebijakan yang mendukung transformasi digital.

Penulis berasumsi bahwa DEFA akan menjadi pendorong dari kemajuan ekonomi digital di ASEAN. Sembilan cakupan yang akan diimplementasikan dalam DEFA merupakan fondasi yang kokoh untuk mendorong kemajuan ekonomi digital di ASEAN. Sebagai kerangka kerja holistik, DEFA tidak hanya membangun ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi tetapi juga berfungsi sebagai action plan yang memfasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi digital ASEAN. Dengan menghadapi tantangan krusial era digital, seperti artificial intelligence, DEFA bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan digital yang timpang di antara negara-negara anggota ASEAN.

Melalui kerja sama yang intensif dan penyelarasan kebijakan, DEFA akan mendorong kesetaraan digital dan memperkuat kolaborasi antar negara anggota, menciptakan sebuah kawasan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berdasarkan wawancara dengan Perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, perkembangan DEFA telah mengalami tiga kali perundingan dengan progres baru mencapai 5% karena kendala dalam menyatukan kesepakatan di antara anggota ASEAN yang memiliki latar belakang berbeda, namun diperkirakan pembahasan ini akan mencapai 50% pada akhir 2024.

Hingga saat ini, belum ada action plan yang terimplementasikan melalui DEFA karena kepemimpinan Indonesia baru saja meresmikannya. Meskipun demikian, rencana ambisius ini telah menarik perhatian berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN bahwa pada tahun 2024 penyusunan DEFA akan rampung setengahnya dan diharapkan dapat segera dijalankan. Negosiasi DEFA dimulai pada

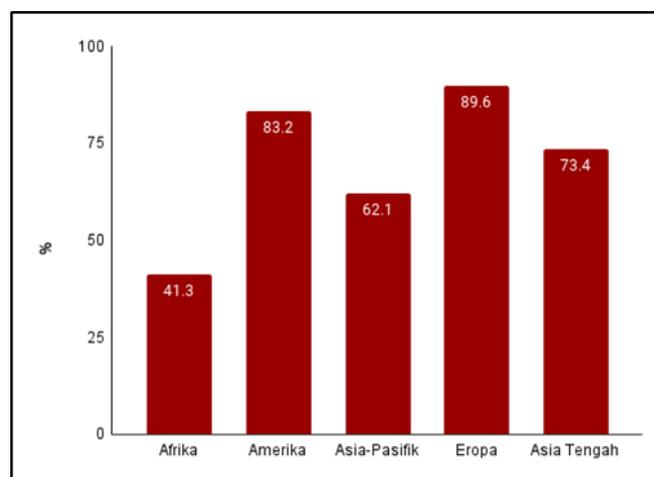
Desember 2023 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025 (ASEAN, 2023c). Upaya ini bertujuan untuk memperkuat integrasi regional dan memajukan berbagai inisiatif strategis yang mendukung perkembangan ekonomi digital di kawasan. Dengan target penyelesaian dalam dua tahun, diharapkan negosiasi ini akan menghasilkan kebijakan dan kerangka kerja yang komprehensif, mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di seluruh negara anggota ASEAN.

## 2) Pembahasan

ASEAN menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan dan kemajuan dalam sektor digital sebagai bagian integral dari keberlanjutan ekonominya dalam lingkup hubungan internasional. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu pasar internet yang tumbuh paling pesat di dunia, diperkirakan bahwa ekonomi digital akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 1 triliun USD pada Produk Domestik Bruto (PDB) regional dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan (Avirutha, 2021). ASEAN memiliki kesempatan yang signifikan dalam ranah ekonomi digital, termasuk potensi pertumbuhan dan inovasi yang sangat cepat.

Terdapat banyak pandangan bahwa Asia Tenggara akan mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi. Namun, tren tersebut tidak akan terwujud tanpa aksi nyata dari kawasan ini untuk melakukan perkembangan berbagai sisi dari ekosistem ekonominya. Pada tahun 2021, nilai *e-commerce* di Asia Tenggara sebesar \$112 miliar, jauh di bawah nilai *e-commerce* Uni Eropa yang mencapai €718bn atau \$776,5 miliar (Google, Temasek, & Bain & Company, 2023; Ecommerce Europe, 2022). Inilah mengapa ASEAN sebagai institusi perlu mendorong ekonomi digital lebih lanjut, tidak hanya puas dengan pertumbuhan 27% dari 2021 hingga 2023 (Google, Temasek, & Bain & Company, 2023).

Selain itu, penulis mencoba mengkomparasikan tingkatan pengguna internet dunia dan terlihat bahwa Asia menjadi regional ke-3. Hal ini semakin menjadi tantangan yang berat dengan melihat tingginya tingkat *Share of Rural Population in ASEAN*.



Gambar 3. Persentase Pengguna Internet terhadap Populasi per Regional  
Sumber : Data Reportal 2023, diolah penulis

ASEAN, berbeda dengan Uni Eropa, memiliki karakter institusi yang unik. Uni Eropa mampu membuat tindakan kolektif dan regulasi bersama dengan lembaga yang dapat memaksa anggotanya mematuhi aturan tersebut. Sebaliknya, ASEAN menerapkan sistem kolektif kolegial tanpa ikatan hukum yang kuat, di mana semua tindakan bersifat sukarela. Seperti yang diutarakan oleh Perwakilan Kelembagaan Internasional dalam wawancara, meskipun pendekatan ini lebih lambat dan membutuhkan negosiasi panjang, tidak adanya paksaan justru menciptakan harmoni dan kebersamaan di antara negara anggota ASEAN, meski implementasi kebijakan bisa menjadi tantangan karena dokumen di ASEAN adalah living document yang dapat di update sesuai kebutuhan, membuat ASEAN lebih damai dan stabil.

Mengadopsi sistem tanpa ikatan hukum yang kuat, dimana semua tindakan bersifat sukarela dan kolektif di ASEAN. Meskipun pendekatan ini menciptakan harmoni dan

kebersamaan di antara negara anggota, ini juga menjadi tantangan dalam menyamakan gap digital. Ketidakhadiran ikatan hukum yang mengikat membuat implementasi kebijakan menjadi lambat dan bervariasi di setiap negara. Hal ini mengakibatkan kesenjangan digital di antara negara anggota ASEAN tetap ada, karena setiap negara bergerak dengan kecepatan dan kapasitas yang berbeda dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital. Dengan dokumen yang bersifat hidup, kebijakan harus sering disesuaikan, namun tanpa paksaan hukum, upaya menyamakan standar digital menjadi lebih rumit dan menantang. Oleh karena itu, strategi dari kepemimpinan ASEAN menjadi sangat penting untuk tetap mendorong kemajuan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Kemudian pentingnya kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023 terletak pada peran sentralnya dalam mewujudkan kemajuan ekonomi digital. Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi digital di ASEAN dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 60% dalam lima tahun karena pasar *e-commerce* yang terus berkembang (Hutabarat, 2022). Kontribusi yang telah diberikan Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan momentum bagi kemajuan kawasan ini. Maka ASEAN memiliki potensi besar yang semakin tergantung pada kepemimpinan Indonesia dalam ekonomi digital.

Komitmen Indonesia sebagai ketua ASEAN tercermin dalam Chair Statement ke-42 dan ke-43, yang mencerminkan tema "*ASEAN Leaders Efficient Dream of Growth and Prosperity*" Fokus utamanya adalah memperkuat ASEAN sebagai organisasi yang lebih cepat tanggap dan efisien dalam menghadapi tantangan saat ini (Wulandari, 2024). Komitmen Indonesia terhadap ekonomi digital sangat jelas di sini, di mana upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam menggerakkan pertumbuhan dan kemakmuran di kawasan melalui penguatan ekonomi digital.

Berikut analisis penulis mengenai relevansi pentingnya strategi Indonesia pada kepemimpinan ASEAN 2023 terhadap kemajuan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara melalui konsep Ekosistem Ekonomi Digital ASEAN :

**a) Siklus Digital Core**

Strategi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 sangat selaras dengan konsep ekosistem ekonomi digital yang diusung oleh DEFA. Dengan melanjutkan *ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025*, Indonesia berfokus pada peningkatan siklus pertama dari ekosistem tersebut, yaitu *Digital Core*. Beberapa langkah utama termasuk (ASEAN, 2021a):

- Implementasi 5G dan IoT melalui Pusat Keunggulan: Memastikan bahwa teknologi canggih seperti 5G dan IoT dapat diadopsi secara luas dan efektif, meningkatkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk ekonomi digital.
- Keamanan Digital: Memperkuat metrik keamanan digital, undang-undang keamanan data, dan koordinasi keamanan siber, guna melindungi infrastruktur digital dan meningkatkan kepercayaan pengguna.
- Penyederhanaan Undang-Undang Data Lintas Batas: Mengurangi hambatan dalam pertukaran data internasional, yang penting untuk perdagangan digital dan operasionalisasi teknologi yang berbasis data.
- Kerangka Kerja Pajak bagi Startup: Menyediakan aturan pajak yang jelas dan mendukung bagi startup digital, yang akan mendorong inovasi dan investasi di sektor digital.
- Peningkatan Produktivitas Departemen Pemerintah: Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pemerintah.
- Pusat Penggunaan Layanan Digital: Mendirikan pusat untuk memfasilitasi penggunaan layanan digital oleh masyarakat dan bisnis, mendorong adopsi teknologi digital di seluruh lapisan masyarakat.

Semua langkah ini merupakan bagian integral dari membangun *Digital Core* yang kuat, yang akan mendukung ekosistem ekonomi digital ASEAN. Dengan fokus pada infrastruktur digital, keamanan, regulasi yang mendukung, dan peningkatan kapasitas, Indonesia membantu menciptakan dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan ASEAN.

### b) **Siklus *Digitally Enabled Economy***

Strategi kedua Indonesia dalam melanjutkan Peta Jalan *Bandar Seri Begawan Roadmap* (BSBR) 2021 selaras dengan siklus kedua dari ekosistem ekonomi digital DEFA, yaitu *Digitally Enabled Economy*. Ini dapat dianalisis sebagai berikut (ASEAN, 2021b):

- Pelaksanaan Platform E-Form D: Mempermudah perdagangan dan administrasi lintas negara melalui platform digital, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses bisnis.
- Penggunaan QR Code untuk Pembayaran Digital: Memperluas aksesibilitas dan adopsi pembayaran digital yang aman dan mudah digunakan, yang penting bagi ekonomi digital yang inklusif.
- Pembentukan DEFA: Mengembangkan kerangka kerja ekonomi digital yang terintegrasi, menyediakan regulasi dan panduan yang mendukung inovasi dan transformasi digital.

Strategi-strategi ini berkontribusi langsung pada penguatan siklus *Digitally Enabled Economy*, yang fokusnya adalah pada penerapan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengimplementasikan platform digital dan mengembangkan regulasi yang mendukung, Indonesia membantu menciptakan ekosistem yang memungkinkan bisnis dan konsumen untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN.

### c) **Siklus *Induced Benefit***

Strategi ketiga dan keempat Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 menunjukkan benang merah dengan siklus ketiga dari ekosistem ekonomi digital DEFA, yaitu *Induced Benefit*, melalui pelaksanaan ADGMIN dan inisiasi pembentukan DEFA.

#### ● ADGMIN

Sebagai forum dialog antar menteri teknologi negara-negara ASEAN, ADGMIN memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan kolaborasi dalam pengembangan teknologi digital (ASEAN, 2021c). Diskusi dan koordinasi dalam ADGMIN menghasilkan kebijakan dan inisiatif yang mendorong transformasi digital di berbagai sektor, meningkatkan kemampuan negara-negara ASEAN untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar global.

#### ● DEFA

DEFA sebagai kerangka kerja ekonomi digital ASEAN, menyediakan panduan dan regulasi yang terintegrasi, mendukung inovasi, keamanan siber, dan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan (ASEAN, 2023a). Inisiatif ini memperkuat infrastruktur digital dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis digital, baik bagi perusahaan besar maupun UMKM, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing regional.

Dengan demikian, strategi ADGMIN dan DEFA berkontribusi pada *Induced Benefit* dengan mengakselerasi adopsi teknologi digital, memperkuat kolaborasi regional, dan meningkatkan dampak ekonomi digital secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia mendorong ASEAN menuju ekosistem digital yang lebih maju, inklusif, dan tangguh.

## D. **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi digital merupakan domain yang tidak hanya penting tetapi juga mendesak bagi semua pemangku kepentingan global untuk diperhatikan dan dikembangkan demi keberlangsungan institusi. ASEAN telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memajukan ekonomi digitalnya, tetapi masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar kawasan ini mencapai potensi sepenuhnya di era digital yang semakin kompleks ini. Pentingnya inklusi digital tidak boleh diabaikan. ASEAN harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan, memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital. ASEAN harus memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh kawasan ASEAN. Penulis menemukan bahwa pada tahun 2023, Indonesia sebagai Ketua ASEAN memberikan kontribusi maksimal dalam memajukan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Melalui penguatan kerangka kebijakan yang ada, di antaranya :

1. Indonesia melanjutkan roadmap *ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025* sebagai *grand design* jangka panjang digitalisasi di kawasan ASEAN.

2. *Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) 2021* sebagai action plan untuk kemajuan ekonomi digital di kawasan ini.
3. Indonesia juga aktif melaksanakan ADGMIN untuk terus mengkaji isu-isu yang telah dan akan dibahas, termasuk isu-isu baru di ranah ekonomi digital.
4. Indonesia menginisiasikan pembentukan DEFA sebagai jawaban atas langkah ASEAN yang belum stabil dalam menghadapi tantangan digital. DEFA diharapkan menjadi kerangka kerja yang memberikan solusi untuk tantangan digital yang lebih kompleks di masa depan. Penemuan ini diperoleh melalui integrasi teori institusi regional dan ekonomi digital, menunjukkan bahwa pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam ekonomi digital yang dinamis dan berkembang.

Penemuan ini didasarkan pada integrasi teori institusi regional dan ekonomi digital, menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen antar negara-negara ASEAN untuk menghadapi dan memanfaatkan transformasi digital secara efektif. Dengan demikian, upaya Indonesia dalam memimpin ASEAN menuju masa depan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan merupakan langkah yang krusial dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan ASEAN di tingkat global.

## E. Referensi

- Andis Rafaldhanis, M. R. (2023). ASEAN sebagai Lingkaran Konsentris Pertama Indonesia. *Jurnal Alternatif - Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1). <https://doi.org/10.31479/jualter.v14i1.54>
- Aritenang, A. F. (2017). Impact of state restructuring on indonesia's regional economic convergence. Flipside Digital Content Company Inc.
- ASEAN. (n.d.). Major Sectoral Bodies/Committees. ASEAN.Org. Retrieved June 26, 2024, from <https://ASEAN.org/our-communities/economic-community/ASEAN-digital-sector/major-sectoral-bodies-committees/>
- ASEAN. (2021a). ASEAN Digital Master Plan 2025.
- ASEAN. (2021b). Bandar Seri Begawan Roadmap 2021.
- ASEAN. (2021c). The 1 st ASEAN Digital Ministers' Meeting and Related Meetings. ASEAN.org.
- ASEAN. (2023a). Digital Economy Framework Agreement (DEFA): ASEAN to leap forward its digital economy and unlock US\$2 Tn by 2030. ASEAN.Org. <https://ASEAN.org/ASEAN-defa-study-projects-digital-economy-leap-to-us2tn-by-2030/>
- ASEAN. (2023b). Leaders' Statement On The Development Of The Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA). ASEAN.
- ASEAN. (2023c). Study On The Asean Digital Economy Framework Agreement.
- ASEAN. (2023d). In ASEAN Statistical Highlights 2023. <https://www.ASEANstats.org/wp-content/uploads/2023/10/ASH-2023-v1.pdf>
- ASEAN Indonesia. (2023). Exploring the meaning of ASEAN matters: Epicentrum of growth. <https://ASEAN2023.id/en/news/exploring-the-meaning-of-ASEAN-matters-epicentrum-of-growth>
- Avirutha, A. A. (2021). ASEAN in digital economy: Opportunities and challenges. *Journal of ASEAN PLUS Studies*, 2(1), 17–25.
- BeritaSatu. (2023). BeritaSatu Spesial [Video]. In YouTube. [https://www.youtube.com/live/xdjQ\\_sHqpA8?si=Opirt3\\_m4RgLBmfY](https://www.youtube.com/live/xdjQ_sHqpA8?si=Opirt3_m4RgLBmfY)
- Crowell. (2024). 4th ASEAN Digital Ministers' Meeting: Enhancing digital trade and growth in Asia Tenggara. Crowell & Moring LLP. <https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/4th-ASEAN-digital-ministers-meeting-enhancing-digital-trade-and-growth-in-southeast-asia>
- Data Reportal. (2023). Digital 2023: Local Country Headlines Report. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2023-local-country-headlines>
- Deloitte. (2021). What is the digital economy?. Retrieved from <https://www.deloitte.com/mt/en/Industries/technology/research/mt-what-is-digital-economy.html>
- Dursun, B. (2023). A QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUE: INTERVIEW. *Disiplinlerarasi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 7(14), 100–113. <https://doi.org/10.57135/jier.1245193>

- Ecommerce Europe. (2022). Commerce in Motion Index 2022: Full Version [PDF]. Retrieved from [https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/CMI2022\\_FullVersion\\_LIGHT\\_v2.pdf](https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/CMI2022_FullVersion_LIGHT_v2.pdf)
- Frank, M., Roehrig, P., & Pring, B. (2017). What to do when machines do everything: How to get ahead in a world of AI, algorithms, bots, and big data. John Wiley & Sons.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). e-Conomy SEA 2023 report: Indonesia. Humas. (2023, September 8). DEFA andalan ASEAN wujudkan epicentrum of growth. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/defa-andalan-ASEAN-wujudkan-epicentrum-of-growth/>
- Hutabarat, L. F. (2022). Penguatan Sektor E-Commerce ASEAN Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Optimalisasi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Policy Brief: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 7(2), 1–6.
- Kemendag. (2023). Pertemuan ke-23 ASEAN Economic Community Council (AECC). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-ke-23-ASEAN-economic-community-council-aecc>
- Kemenko Perekonomian. (2023). FEKDI 2023 : Ekonomi Digital Sebagai Buffer dan Akselerator Perekonomian Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5126/fekdi-2023-ekonomi-digital-sebagai-buffer-dan-akselerator-perekonomian-nasional>
- Lenz, T. (2017). Frame diffusion and institutional choice in regional economic cooperation. *International Theory*, 10(1), 31–70. <https://doi.org/10.1017/s1752971917000136>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Pearson Education Limited.
- Øverby, H., & Audestad, J. A. (2021). *Foundations, Business Models And Case Studies. In Introduction to Digital Economics*. Springer International Publishing. [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78237-5\\_19](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78237-5_19)
- Park, C. (2024). Association of Southeast Asia Nations Economic Integration: Addressing challenges and embracing opportunities. *Asian Economic Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/aep.12462>
- Phnom Penh. (2024). How ASEAN is building trust in its digital economy. *Phnom Penh Post*. <https://www.phnompenhpost.com/opinion/how-ASEAN-is-building-trust-in-its-digital-economy>
- Sevilla-Liu, A. (2023). The theoretical basis of a functional-descriptive approach to qualitative research in CBS: With a focus on narrative analysis and practice. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 30, 210–216. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.11.001>
- Smith, A. (2006). *The Theory of Moral Sentiments*. Courier Corporation.
- Tran, L. Q. T., Phan, D. T., & Nguyen, M. T. (2022). Digital economy: A comparative study in ASEAN. *Theory, Methodology, Practice*, 18(2), 83–92. <https://doi.org/10.18096/tmp.2022.02.05>
- University of Pennsylvania. (2023). What is the digital economy? Retrieved from <https://online.wharton.upenn.edu/blog/what-is-the-digital-economy/>
- Wibowo, E. W. (2018). ANALISIS EKONOMI DIGITAL DAN KETERBUKAAN TERHADAP PERTUMBUHAN GDP NEGARA ASEAN. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 7(2), 66. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.235>
- Yadav, D. (2021). Criteria for good qualitative research: A comprehensive review. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 31(6), 679–689.